



# ROADMAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

Mahkamah Agung RI



# SASARAN REFORMASI BIROKRASI

## Sesuai Roadmap RB 2015-2019:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas



# ROADMAP- Menuju Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel:

**TERWUJUDNYA BIROKRASI BERKINERJA TINGGI  
BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL  
BIROKRASI YANG MENGGUNAKAN SELURUH SUMBER DAYA YANG  
DIMILIKI SECARA EFISIEN UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK**

**2015**

1. Tersusunnya penguatan kebijakan penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi
2. Tersusunnya penguatan kebijakan pengawasan
3. Tersusunnya kebijakan pengembangan sistem pengaduan nasional
4. Tersusunnya kebijakan penguatan sistem Akuntabilitas

**2016**

1. Meningkatnya internalisasi sistem nilai dan integritas birokrasi
2. Meningkatnya sinergitas sistem pengawasan
3. Meningkatnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
4. Meningkatnya keterbukaan sistem pelaporan
5. Meningkatnya penerapan sistem *reward and punishment* dalam manajemen kinerja nasional

**2017**

1. Meningkatnya integritas birokrasi
2. Meningkatnya sinergitas sistem pengawasan
3. Meningkatnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
4. Meningkatnya keterbukaan sistem pelaporan
5. Meningkatnya penerapan sistem *reward and punishment* dalam manajemen kinerja nasional
6. Meningkatnya keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi
7. Meningkatnya independensi APIP
8. Meningkatnya pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah
9. Meningkatnya sinergitas sistem pelaporan;

**2018**

1. Meningkatnya integritas birokrasi
2. Meningkatnya sinergitas sistem pengawasan
3. Meningkatnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
4. Meningkatnya intensitas keterbukaan sistem pelaporan
5. Meningkatnya intensitas penerapan sistem *reward and punishment* dalam manajemen kinerja nasional
6. Meningkatnya intensitas keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi
7. Meningkatnya intensitas independensi APIP
8. Meningkatnya intensitas pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah
9. Meningkatnya kinerja organisasi instansi pemerintah
10. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan;

**2019**

1. Meningkatnya integritas birokrasi
2. Meningkatnya sinergitas sistem pengawasan
3. Meningkatnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
4. Meningkatnya intensitas keterbukaan sistem pelaporan
5. Meningkatnya intensitas penerapan sistem *reward and punishment* dalam manajemen kinerja nasional
6. Meningkatnya intensitas keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi
7. Meningkatnya intensitas independensi APIP
8. Meningkatnya intensitas pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah
9. Meningkatnya kinerja organisasi instansi pemerintah
10. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan;
11. Meningkatnya transparansi informasi laporan keuangan dan kinerja;
12. Meningkatnya akuntabilitas publik;
13. Terinternalisasinya Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Integritas pada Instansi Pemerintah
14. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan bebas dari praktek KKN
15. Meningkatnya kontribusi setiap instansi pemerintah pada peningkatan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan

**KONDISI SAAT INI**

**KONDISI YANG DIHARAPKAN**

# ROADMAP- Menuju Birokrasi yang Efektif dan Efisien:

TERWUJUDNYA BIROKRASI BERKINERJA TINGGI  
BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN  
BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS TINGGI, BERSIH DARI  
PRAKTEK KKN, DAN AKUNTABEL PADA PUBLIK

2015

1. Tersusunnya kebijakan penguatan Reformasi Birokrasi
2. Tersusunnya design kelembagaan K/LPNK/LNS dan pemda
3. Tersusunnya kebijakan implementasi UU Administrasi pemerintahan
4. Tersusunnya kebijakan penyederhanaan bisnis proses
5. Tersusunnya kebijakan penguatan e-government
6. Tersusunnya penguatan sistem pengadaan secara elektronik
7. Tersusunnya berbagai kebijakan pelaksanaan UU ASN
8. Tersusunnya penguatan kebijakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan

2016

1. Meningkatnya kualitas dan intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi
2. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan
3. Meningkatnya efisiensi
4. Meningkatnya kecepatan proses penyelenggaraan pemerintahan
5. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi
6. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
7. Meningkatnya kemampuan unit pengelola SDM untuk menerapkan manajemen SDM yang berbasis merit
8. Meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur
9. Meningkatnya sinergi antar instansi pemerintah dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan
10. Meningkatnya peran serta publik dalam perumusan kebijakan

2017

1. Meningkatnya kualitas dan intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi
2. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan
3. Meningkatnya efisiensi
4. Meningkatnya kecepatan proses penyelenggaraan pemerintahan
5. Meningkatnya sinergi fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah
6. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi
7. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
8. Meningkatnya penerapan manajemen SDM yang berbasis merit
9. Meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur
10. Meningkatnya transparansi dalam rekrutmen pegawai
11. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan
12. Meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan pemerintah;

2018

1. Meningkatnya kualitas dan intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi
2. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan
3. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi;
4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi
5. Meningkatnya kecepatan proses penyelenggaraan pemerintahan
6. Meningkatnya penggunaan teknologi
7. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
8. Meningkatnya penerapan manajemen SDM yang berbasis merit
9. Meningkatnya transparansi dalam rekrutmen pegawai
10. Meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur
11. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan
12. Meningkatnya kualitas kebijakan publik
13. Meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan pemerintah;

2019

1. Meningkatnya kualitas dan intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi
2. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan
3. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi;
4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi
5. Meningkatnya kecepatan proses penyelenggaraan pemerintahan
6. Meningkatnya efektivitas tata hubungan antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
7. Meningkatnya penggunaan teknologi
8. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
9. Meningkatnya penerapan manajemen SDM yang berbasis merit
10. Meningkatnya transparansi dalam rekrutmen pegawai
11. Meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur
12. Meningkatnya integritas aparatur
13. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan publik
14. Meningkatnya kualitas kebijakan publik
15. Meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan pemerintah;

KONDISI SAAT INI

KONDISI YANG DIHARAPKAN

# ROADMAP- Menuju Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas

TERWUJUDNYA BIROKRASI BERKINERJA TINGGI  
BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS  
*BIROKRASI YANG MAMPU MEMENUHI PUBLIC NEEDS*

2015

1. Meningkatnya kualitas implementasi UU 25/2009
2. Meningkatnya modernisasi sistem dan manajemen pelayanan publik

2016

1. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan
2. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan;
3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan;
4. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan;
5. Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik;
6. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan;
7. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

2017

1. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan
2. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan;
3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan;
4. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan;
5. Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik;
6. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan;
7. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
8. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
9. Meningkatnya investasi dalam negeri.

2018

1. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan
2. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan;
3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan;
4. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan;
5. Meningkatnya intensitas inovasi dalam pelayanan publik;
6. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan;
7. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
8. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
9. Meningkatnya kepercayaan global terhadap Indonesia
10. Meningkatnya investasi dalam dan luar negeri.

2019

1. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan
2. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan;
3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan;
4. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan;
5. Meningkatnya intensitas inovasi dalam pelayanan publik;
6. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan;
7. Meningkatnya kesadaran publik terhadap kualitas pelayanan
8. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
9. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
10. Meningkatnya kepercayaan global terhadap Indonesia
11. Meningkatnya investasi dalam dan luar negeri.
12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang setara dengan negara-negara maju di Asia
13. Menurunnya kesenjangan kualitas pelayanan antar daerah dan antar golongan masyarakat
14. Terwujudnya budaya pelayanan prima
15. Meningkatnya daya saing nasional

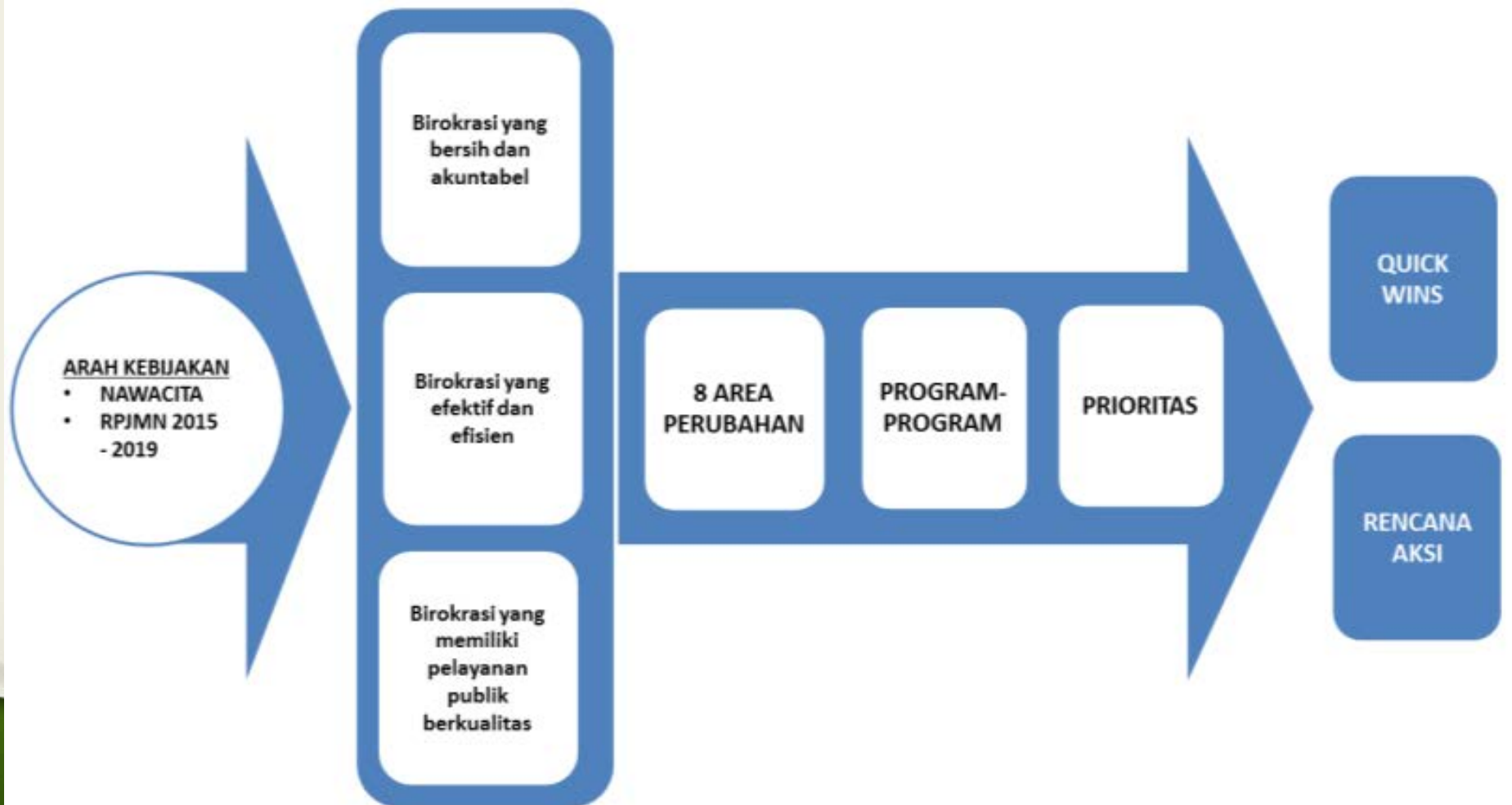
KONDISI SAAT INI

KONDISI YANG DIHARAPKAN

# KENAPA HARUS ADA ROADMAP?



# KERANGKA ARAH KEBIJAKAN DAN ROADMAP RB





# HASIL PMPRB MA RI 2015

NO	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2014	Nilai 2015	% Capaian
<b>A</b>	<b>Pengungkit</b>				
1.	Manajemen Perubahan	5,00	3,31	3,85	77,04%
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,09	3,75	75,00%
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,64	3,68	61,28%
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	2,17	3,63	72,65%
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	6,34	13,08	87,22%
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,45	4,48	74,60%
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	3,99	8,73	72,73%
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,54	4,86	80,97%
	<b>Subtotal Komponen Pengungkit</b>	<b>60,00</b>	<b>26,73</b>	<b>46,06</b>	<b>76,77%</b>





NO	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2014	Nilai 2015	% Capaian
<b>B</b>	<b>HASIL</b>				
1.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	14,09	13,72	68,61%
2.	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	3,00	7,66	76,60%
3.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,50	6,00	60,00%
	<b>Sub Total Komponen Hasil</b>	<b>40,00</b>	<b>21,59</b>	<b>27,38</b>	<b>68,45%</b>
	<b>Sub Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60,00</b>	<b>26,73</b>	<b>46,06</b>	<b>76,77%</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>100,00</b>	<b>48,33</b>	<b>73,44</b>	<b>73,44%</b>

Indeks Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI = **73,44**

Predikat = **BB (Sangat Baik)**



# EVALUASI HASIL PMPRB MA RI 2015



Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13  
Jakarta Pusat, Indonesia

[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)





Terima Kasih

